

Peningkatan Literasi Keuangan Digital Pelaku UMKM Melalui Sosialisasi Sistem Pembayaran Non-Tunai di Kabupaten Sorong

¹⁾Latifah Dian Iriani*, ²⁾Nurul Hidayah, ³⁾Febry Jein Andjar, ⁴⁾Evi Mufrihah Zein, ⁵⁾Akmal Ridwan

^{1,2,3,4,5}Program Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Sorong, Sorong, Papua Barat Daya

Email Corresponding: iriani.latifahdian@gmail.com*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Literasi Keuangan Digital Sistem Pembayaran Non-Tunai Pemberdayaan Perempuan UMKM	Perkembangan teknologi telah mendorong berbagai inovasi diberbagai sektor termasuk sektor keuangan. Sistem pembayaran juga mengalami perkembangan dari pembayaran tunai menjadi pembayaran non-tunai. Namun, manfaat dari sistem pembayaran non-tunai belum banyak digunakan oleh pelaku usaha UMKM perempuan khususnya yang berada di Kabupaten Sorong. Hal ini disebabkan oleh kurang informasi terkait manfaat dari sistem pembayaran non-tunai bagi pelaku usaha UMKM perempuan sekaligus juga sebagai ibu rumah tangga sehingga berpengaruh pada rendahnya literasi keuangan digital. Selain itu, lingkungan mereka masih di dominasi oleh sistem pembayaran tunai sehingga muncul rasa kekhawatiran dalam menggunakan sistem tersebut. Manfaat sistem pembayaran non-tunai tidak hanya bagi konsumen tetapi juga produsen. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan sosialisasi terkait sistem pembayaran non-tunai dengan memanfaatkan layanan keuangan digital khususnya bagi pelaku usaha UMKM perempuan. Terlebih, sistem tersebut dapat meningkatkan usaha bagi pelaku UMKM dengan menjangkau konsumen yang lebih luas. Diperlukan pendampingan oleh pemerintah bagi pelaku usaha UMKM demi meningkatkan literasi keuangan digital sehingga berpengaruh pada kenaikan kinerja usaha mereka.
ABSTRACT	
Keywords: Digital Financial Literacy Payment System Non-Cash Women Empowerment SMEs	Technological developments have encouraged various innovations in various sectors, including the financial sector. The payment system is also experiencing development from cash payments to non-cash payments. However, the benefits of the non-cash payment system have not been widely used by female MSME entrepreneurs, especially those in Sorong Regency. This is caused by a lack of information regarding the benefits of non-cash payment systems for female MSME entrepreneurs as well as housewives, which has an impact on low digital financial literacy. Apart from that, their environment is still dominated by the cash payment system, so there is a feeling of concern about using this system. The benefits of a non-cash payment system are not only for consumers but also producers. Therefore, community service activities aim to provide outreach regarding non-cash payment systems by utilizing digital financial services, especially for female MSME entrepreneurs. Moreover, this system can increase business for MSME players.
This is an open access article under the CC-BY-SA license.	
	

I. PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 telah mendorong individu untuk menggunakan teknologi di berbagai bidang termasuk sektor keuangan. Hal tersebut juga mendorong industri keuangan untuk melakukan inovasi seperti sistem pembayaran non-tunai. Sistem pembayaran non tunai juga mengalami perkembangan dari alat pembayaran berbasis kertas (paper based) seperti cek dan bilyet, kemudian menjadi alat pembayaran menggunakan kartu (paperless) seperti transfer dana elektronik, kartu ATM, kartu kredit, kartu debit, dan kartu prabayar (card-based). Bank Indonesia telah menginisiasi sistem pembayaran non-tunai sejak tahun

2009 dengan menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009. Peraturan tersebut juga sekaligus mencanangkan Gerakan Less Cash Society (GLCS) melalui Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT). Adapun tujuan dari implementasi GNNT antara lain: praktis, aman, aksesnya luas, serta mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

Adapun faktor pendorong dari penggunaan uang elektronik sebagai implementasi dari GNNT antara lain: kemudahan transaksi, kecepatan transaksi, terjaminnya keamanan data pribadi, jaminan keamanan pribadi, ketersediaan riwayat transaksi, dan terintegrasi dengan aplikasi belanja daring atau online (Karim et al., 2022). Sedangkan faktor pendukungnya adalah praktis, aman, aksesnya luas, serta mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Di sisi lain, sistem pembayaran non tunai bersifat *perceived of usefulness* dan *perceived ease of use* sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat dalam efektifitas pekerjaan dan berpengaruh pada peningkatan produktivitas (Lestari et al., 2021; Hidayah et al., 2023). Namun, Anjelina (2018) menemukan bahwa penggunaan pembayaran non tunai tidak dipengaruhi oleh *perceived usefulness*, *perceived ease of use*, *compatibility*, *perceived trust*, *perceived risk*, dan *perceived cost*. Bahkan, penggunaan pembayaran tersebut dipengaruhi oleh *subjective norm* (pengaruh lingkungan), *social image*, dan *perceived benefit*.

Penggunaan sistem pembayaran non tunai berdampak pada perekonomian melalui peningkatan jumlah uang yang beredar sehingga mampu meningkatkan *gross domestic product* (GDP) serta berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Mulati et al., 2021; Syarifuddin et al., 2009; Muhammad et al., 2021). Hal ini dipengaruhi oleh perubahan perilaku bagi konsumen dan produsen dalam memanfaatkan pembayaran non tunai. Sistem pembayaran non tunai berdampak bagi konsumen melalui peningkatan konsumsi, jam kerja, dan waktu senggang (*leisure time*). Peningkatan konsumsi bagi masyarakat akan menstimulus kegiatan usaha melalui proses percepatan uang sehingga mendorong perekonomian sektor riil dalam meningkatkan profitabilitas khususnya bagi pelaku UMKM. (Rahmi, 2020; Hidayah et al., 2023).

Pembayaran non-tunai dapat berpengaruh pada pertumbuhan UMKM melalui adopsi teknologi sehingga pelaku UMKM dapat meningkatkan inovasi bisnis melalui penggunaan dompet digital atau aplikasi pembayaran. Sistem pembayaran non tunai juga mendorong UMKM untuk semakin kompetitif di dunia usaha dikarenakan dapat meningkatkan kinerja UMKM melalui inovasi bisnis, efisiensi, keamanan, kemudahan akses keuangan, dan kepuasan pelanggan (Triagita et al., 2024). Pentingnya sistem pembayaran non tunai demi memperluas pangsa pasar bagi pelaku UMKM. Hal ini dikarenakan sektor tersebut merupakan sektor yang paling mudah dan cepat dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor UMKM juga mampu menyerap 97 persen dari total angkatan kerja di Indonesia. Oleh karena itu, pentingnya literasi digital bagi pelaku UMKM terkait sistem pembayaran non tunai.

Pengenalan sistem pembayaran non tunai bagi pelaku UMKM telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya (Triagita, et al, 2024; Suarantalla, et al, 2023; Lestari, et al, 2021). Adanya persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, kepercayaan, dan sikap positif terhadap sistem pembayaran non tunai mendorong pelaku UMKM dalam mengadopsi sistem tersebut (Widowati & Khusaeni, 2022). Bahkan, sistem pembayaran non tunai paling banyak digunakan di perkotaan dikarenakan pemahaman dan pengalaman yang mereka peroleh mudah didapatkan dan dijumpai di daerah perkotaan (Febrinda, et al, 2022). Hal ini menunjukkan pentingnya pengenalan lebih jauh terhadap sistem pembayaran non tunai bagi pelaku UMKM di daerah perdesaan sehingga mampu meningkatkan ekonomi berkelanjutan di desa.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (2022) menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan laki-laki sebesar 86,28% dan perempuan sebesar 83,88%, dimana hal ini juga menunjukkan bahwa laki-laki cenderung lebih siap untuk mengadopsi layanan digital keuangan (DFS) dibandingkan perempuan. Kesiapan digital ini diukur dari kepemilikan *smartphone* dan kemampuan menggunakannya untuk mengunduh aplikasi dan menelusuri internet. Seiring dengan perkembangan DFS di Indonesia, upaya untuk menutup kesenjangan ini perlu dilakukan agar manfaat DFS juga dapat dirasakan oleh perempuan, terutama kelompok berpendapatan rendah dan kemampuan digital yang terbatas. Selain itu, rendahnya inklusi keuangan bagi perempuan menunjukkan rendahnya kesempatan aksesibilitas dalam bentuk kepemilikan akun keuangan, pelayanan keuangan, dan produk keuangan lainnya sehingga perlu untuk meningkatkan literasi keuangan bagi perempuan.

Adapun upaya dan komitmen bagi pemerintah melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif Perempuan (SNKI-P) dalam menyediakan sebuah program yang komprehensif dan responsif terhadap gender untuk meningkatkan akses terhadap layanan keuangan formal, seraya melatih kemampuan finansial perempuan

termasuk memberikan literasi keuangan digital. Program tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam transformasi ekonomi digital dan inklusi keuangan, salah satunya melalui strategi edukasi dan literasi bagi masyarakat khususnya perempuan pelaku usaha, untuk meningkatkan akses terhadap transaksi non tunai yang mudah, cepat, dan terjangkau. Hal ini bertujuan untuk membuat masyarakat terutama perempuan dapat berdaya saing dan mandiri secara ekonomi.

Perlunya meningkatkan partisipasi tenaga kerja perempuan demi mengurangi kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan, dimana pendapatan perempuan cenderung lebih rendah dari laki-laki sebesar 26,4%. Pentingnya pemberdayaan perempuan di sektor UMKM sebagai tonggak perekonomian bangsa karena berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan perempuan yang bekerja di sektor informal sebesar 64,43% dibandingkan yang bekerja di sektor formal sebesar 35,57% (BPS). Namun, ada sebagian perempuan yang belum mampu terlibat di sektor UMKM karena kesulitan dalam membagi waktu antara mengurus rumah tangga dan anak serta kurangnya pemahaman terkait tata kelola keuangan pada bisnis rumahan (Hidayah, et al, 2023). Terlebih pada perempuan yang berada di pedesaan, dimana mereka memiliki kendala terkait waktu dan mobilitas sehingga hal tersebut menjadi hambatan dalam mengakses layanan keuangan. Namun, dengan berkembangnya teknologi di sektor keuangan melalui layanan keuangan digital telah meringankan hambatan tersebut. Oleh karena itu, perlunya peningkatan literasi digitalisasi keuangan pada pelaku UMKM melalui sistem pembayaran non-tunai (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022).

Telah banyak sosialisasi terkait sistem pembayaran non tunai bagi masyarakat, pelaku UMKM, dan generasi millennial (Febrinda & Ningsih, 2022; Kurniawati, et al, 2021; Lestari, et al, 2021; Oktawiranti, et al, 2024; Triagita, et al, 2024; Suarantalla, et al, 2023). Namun, belum banyak diadakan sosialisasi terkait sistem pembayaran non tunai dengan memperhatikan aspek gender khususnya perempuan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perempuan di sektor UMKM. Kemudian, penggunaan sistem pembayaran non tunai paling banyak digunakan di daerah perkotaan sehingga perlunya sosialisasi terkait sistem pembayaran non tunai di daerah perdesaan/kabupaten sehingga bisa memperluas penggunaan sistem pembayaran non tunai. Dengan demikian, pengabdian ini berfokus pada peningkatan literasi keuangan perempuan dalam penggunaan sistem pembayaran non tunai bagi pelaku UMKM. Hal ini mengingat kurang mahirnya perempuan dalam menggunakan teknologi keuangan digital sehingga dapat berpengaruh pada kecakapan perempuan dalam mengelola keuangan baik rumah tangga ataupun bisnis. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) bertujuan untuk menginformasikan dan memperkenalkan sistem pembayaran non-tunai kepada para anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) sehingga mampu memperlebar pangsa pasar usahanya.

II. MASALAH

Setelah adanya diskusi dengan beberapa pengurus dan anggota IWAPI, tim PKM menganalisis dari berbagai masalah bahwa sebagian besar peserta IWAPI merupakan ibu rumah tangga yang telah memiliki produk usaha rumahan dan ada yang baru berniat untuk menciptakan suatu produk usaha. Namun, mereka menghadapi kendala dalam manajemen waktu antara mengembangkan usahanya dan mengurus rumah tangga. Selain itu, kemampuan penggunaan teknologi terkait layanan keuangan digital masih sangat rendah. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya informasi akan manfaat fintech pada layanan keuangan digital dan masih minimnya lingkungan sekitar dalam memanfaatkan layanan keuangan digital. Oleh karena itu, tim PKM berinisiasi untuk mengenalkan dan memberikan informasi terkait penggunaan layanan keuangan digital dengan menggunakan sistem pembayaran non-tunai sehingga adanya efisiensi waktu bagi peserta IWAPI dan mendorong pengembangan usaha mereka dalam bentuk layanan online sehingga mendorong mereka untuk menggunakan sistem pembayaran non-tunai.



Gambar 1. Sosialisasi PKM

III. METODE

Pelaksanaan Sosialisasi Literasi Keuangan Melalui Pengenalan Sistem Pembayaran Non-Tunai dilakukan pada tanggal 18 Desember 2023 bertempat di Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Sosialisasi ini bekerja sama dengan Organisasi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) kabupaten sorong dengan jumlah peserta sebesar 85 peserta. IWAPI merupakan organisasi yang menaungi para pengusaha perempuan di sektor UMKM. Organisasi ini pertama kali didirikan dengan nama Gelanggang Dagang Wanita pada 22 Desember 1928. Kemudian organisasi tersebut mengalami perubahan nama menjadi IWAPI pada 10 Februari 1975 dan tersebar di seluruh Indonesia.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh tim PKM dengan mitra menggunakan pendekatan Participator Rural Appraisal (PRA) sehingga pengabdian ini dapat mendorong pemahaman yang lebih komprehensif yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Adapun pelaksanaan kegiatan PKM terdiri dari 3 tahapan antara lain:

1. Tim PKM bertemu dengan anggota IWAPI untuk membicarakan masalah yang dihadapi dan kendala yang ditemui oleh para pelaku UMKM perempuan. Salah satu kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM di lingkup anggota IWAPI adalah masalah efisiensi waktu dan kurangnya literasi keuangan digital.
2. Tim PKM melaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri seluruh anggota untuk menentukan tema sosialisasi terkait memajukan UMKM berdaya saing di kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Pada akhirnya tim PKM menentukan tema terkait sistem pembayaran Non-Tunai kepada para pelaku UMKM perempuan dalam rangka meningkatkan produktifitas perempuan.
3. Setelah tim PKM mendapatkan gambaran terkait kendala yang dihadapi dan menentukan tema PKM, maka tim PKM segera menyusun materi untuk bahan sosialisasi. Sosialisasi terkait pengenalan sistem pembayaran Non-Tunai oleh tim PKM yang bekerja sama dengan tim IWAPI bertujuan untuk meningkatkan produktivitas melalui efisiensi waktu melalui penggunaan sistem pembayaran Non-Tunai dan peningkatan usaha melalui sistem pembayaran Non-Tunai. Pelaksanaan pelatihan menggunakan media offline dalam menyampaikan materi terkait manfaat dari penggunaan sistem pembayaran Non-Tunai kepada para anggota IWAPI. Materi yang disampaikan kepada peserta terkait mengenal definisi sistem pembayaran, evolusi dalam sistem pembayaran, jenis-jenis sistem pembayaran, kaitannya e-commerce dengan sistem pembayaran, manfaat sistem pembayaran non-tunai, dan contoh-contoh sistem pembayaran Non-Tunai dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahap akhir tim PKM mengadakan sesi interaktif berupa tanya jawab dan berbagi pengalaman sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih kepada para pelaku UMKM terkait penggunaan sistem pembayaran Non-Tunai dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga tahapan kegiatan PKM tersebut diharapkan menjadi satu rangkaian acara yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan PKM yaitu meningkatkan produktifitas para pelaku UMKM perempuan melalui

peningkatan literasi keuangan digital. Harapan dari adanya kegiatan ini adalah para peserta mampu memahami peran dari literasi keuangan digital sehingga mendorong mereka untuk lebih berpartisipasi dalam penggunaan digital keuangan dalam upaya meningkatkan inklusif keuangan dan meningkatkan kinerja para pelaku UMKM perempuan di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.



Gambar 2. Pemaparan Materi

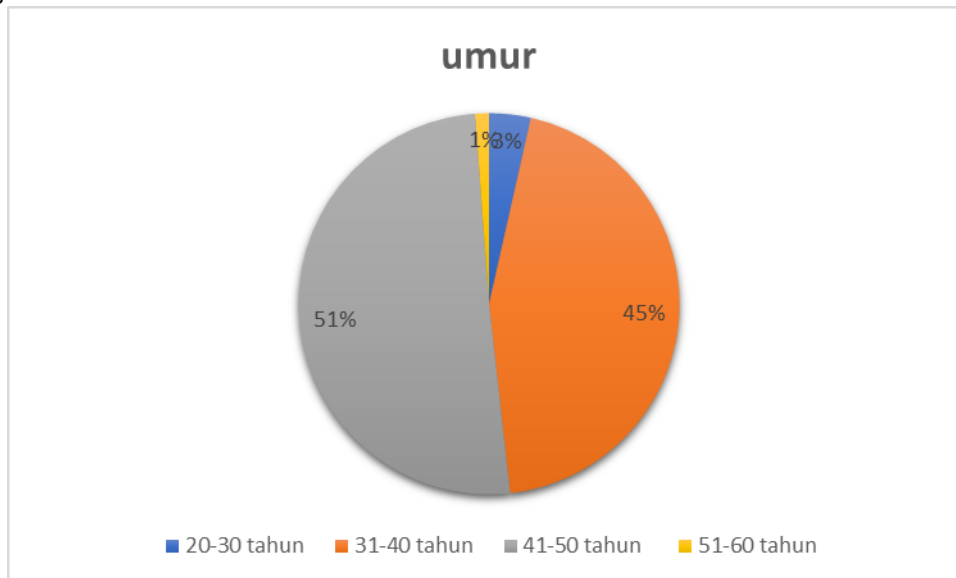


Gambar 3. Kegiatan PkM

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

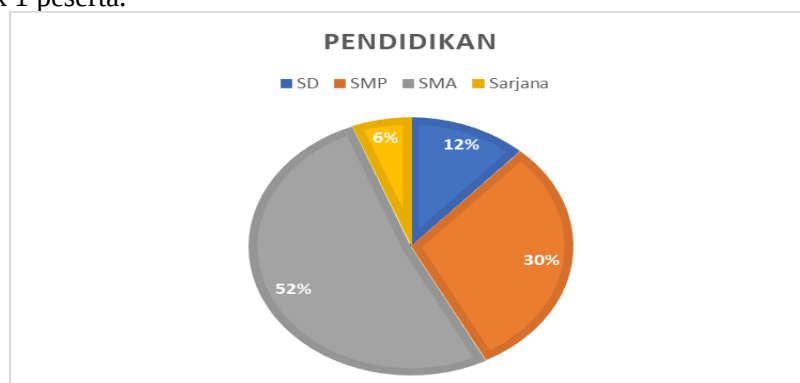
Kegiatan PKM ini dimulai pada 18 Desember 2023, dimana seluruh tim PKM mengadakan rapat bersama Pengurus IWAPI kabupaten Sorong untuk membahas sosialisasi terkait “Peningkatan Daya Saing Usaha Bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Sorong”. Kemudian tim PKM mengadakan rapat koordinasi dalam menentukan tema sosialisasi dan tim PKM memutuskan untuk memberikan pemahaman mereka terkait literasi keuangan digital melalui sistem pembayaran Non-Tunai sehingga berdampak pada peningkatan literasi keuangan digital dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Adapun detail kegiatan PKM ini sebagai berikut:

1. Pelaksana tim PKM ini merupakan dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sorong. Kegiatan ini merupakan bentuk kerja sama dan kolaborasi antara Fakultas Ekonomi dan IWAPI.
2. Pelatihan ini bersifat offline dimana kegiatan ini dilakukan bertempat SP 3, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.
3. Sosialisasi dan FGD dihadiri 85 peserta dimana 100% merupakan perempuan. Adapun karakteristik peserta digambarkan dalam tabel dibawah:



Gambar 4. Grafik Umur Peserta

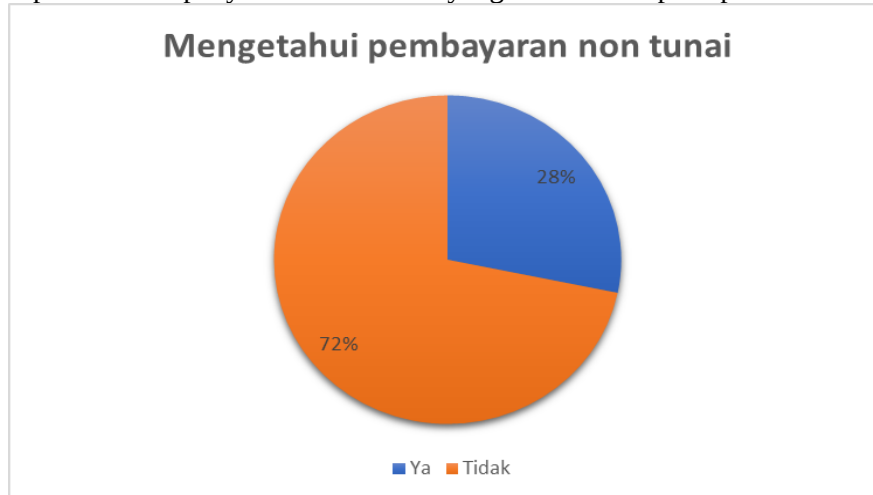
Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa peserta di dominasi umur 41-50 tahun sebanyak 43 peserta, kemudian umur 31-40 tahun sebanyak 38 peserta, umur 20-30 tahun sebanyak 3 peserta, dan umur 51-60 tahun sebanyak 1 peserta.



Gambar 5. Grafik Pendidikan

Adapun pendidikan peserta terdiri dari SD sebanyak 10 orang, SMP sebanyak 26 orang, SMA sebanyak 44 orang, dan Sarjana sebanyak 5 orang.

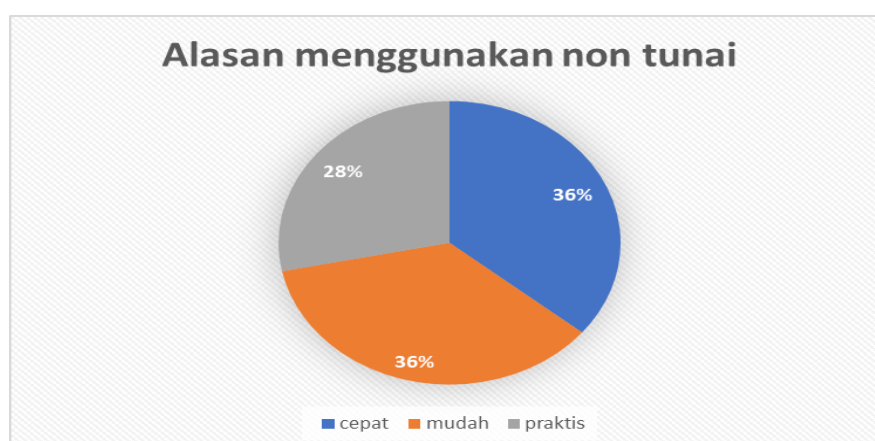
Terdapat beberapa hasil dari penyebaran kuesioner yang diberikan kepada peserta antara lain:



Gambar 6. Grafik Mengetahui sistem pembayaran non tunai



Gambar 7. Grafik Melakukan Pembayaran non tunai



Gambar 8. Grafik Alasan menggunakan pembayaran non tunai



Gambar 9. Grafik Alasan tidak menggunakan pembayaran non tunai

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa sebanyak 24 orang mengetahui terkait pembayaran non tunai dan 61 orang tidak mengetahui terkait pembayaran non tunai. Kemudian terkait pengalaman menggunakan pembayaran non tunai ditemukan bahwa sebanyak 14 orang pernah melakukan pembayaran non tunai dan 71 orang tidak pernah melakukan pembayaran non tunai. Adapun jenis alat pembayaran yang digunakan adalah kartu debit sebanyak 14 orang, mobile banking sebanyak 11 orang, shopeepay sebanyak 7 orang, dan gopay sebanyak 3 orang. Adapun alasan mereka menggunakan sistem pembayaran non tunai dikarenakan cepat, mudah, dan praktis. Sedangkan alasan bagi peserta yang tidak menggunakan non tunai dikarenakan tidak mengetahui tentang konsep dan jenis-jenis sistem pembayaran non tunai, serta ada beberapa yang mengetahui tentang sistem pembayaran non tunai tapi tidak tahu cara menggunakan sistem tersebut.

Adapun hasil diskusi interaktif bersama dengan peserta sosialisasi antara lain:

1. Faktor-faktor yang mendukung peserta menerapkan sistem pembayaran Non-Tunai

Para peserta anggota IWAPI dan juga sebagai pelaku UMKM perempuan menemukan bahwa hampir 100% peserta menggunakan smartphone. Selain itu, jaringan internet di Kabupaten Sorong juga cukup baik sehingga memungkinkan mereka menerapkan sistem pembayaran Non-tunai di kehidupan sehari-hari. Selain itu, seluruh peserta telah memiliki tabungan di bank komersial seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri. Namun, mereka hanya menggunakan buku tabungan dan kartu debit. Hal ini dikarenakan mereka tidak mengetahui dan/atau tidak dapat menggunakan layanan *mobile banking*.

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala peserta dalam menerapkan sistem pembayaran Non Tunai

Adapun kendala bagi penerapan sistem pembayaran Non-Tunai bagi peserta adalah kurang bisa menggunakan teknologi smartphone lebih luas lagi. Peserta yang didominasi oleh kaum perempuan berumur di atas 30-40 tahun memiliki keagapan dalam menggunakan layanan smartphone. Mereka hanya terbatas dalam menggunakan telepon, chat/WA, facebook dan youtube. Namun, mereka memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan *mobile banking*. Hal ini dikarenakan mereka tidak pernah mendapatkan informasi terkait manfaat dari layanan *mobile banking* dan tidak ada pendampingan di keluarga ataupun lingkungan sekitar dalam menggunakan layanan tersebut sehingga mereka tidak mampu dalam menerapkan sistem pembayaran non tunai. Faktor tersebut mendorong mereka untuk merasa *insecure* dan muncul rasa kekhawatiran dalam menggunakan layanan *mobile banking*. Hal ini dapat terlihat dari grafik 6 yang menunjukkan alasan para peserta tidak menggunakan sistem pembayaran non tunai akibat ketidaktahuan informasi terkait sistem pembayaran non tunai dan tidak mengetahui penggunaan sistem pembayaran non tunai meskipun mereka mengetahui tentang sistem tersebut. Terlebih, para peserta didominasi oleh kelompok dewasa dan paruh baya, dimana kelompok umur tersebut agak sulit terkait belajar memahami penggunaan sistem tersebut. Selain itu, lingkungan bisnis yang berada di sekitaran lingkungan mereka yaitu di Kabupaten Sorong masih didominasi oleh penggunaan *cash payment* sehingga membuat mereka masih ketergantungan dengan sistem pembayaran tersebut. Hal ini berbeda dengan

2822

wilayah perkotaan yang sudah cukup banyak menggunakan *dual payment system* yakni *cash payment* dan *cashless payment*.

Berdasarkan hasil pemaparan diskusi diatas menunjukkan bahwa kurangnya informasi terkait manfaat penggunaan sistem pembayaran non-tunai membuat perempuan sukar untuk mengadopsi sistem pembayaran tersebut. selain itu, menurut Diffusion of Innovation Theory (DOI) para responden bersifat laggards, dimana mereka masih senang terhadap tradisi lama sehingga sukar untuk berubah (Lestari et al., 2021). Oleh karena itu, pentingnya edukasi berupa literasi pembayaran non-tunai kepada peserta demi meningkatkan pemahaman dalam penggunaan sistem pembayaran non-tunai (Kurniawati et al., 2021). Terbukti setelah adanya sosialisasi dapat meningkatkan minat para peserta dalam menggunakan sistem pembayaran non-tunai (Lestari et al., 2021). Hal ini juga menunjukkan perlu adanya pendampingan secara berkesinambungan antara pihak IWAPI, tim PKM, pemerintah, maupun perbankan. Pendampingan tersebut dapat meningkatkan kesiapan pelaku UMKM perempuan (peserta) dalam menerapkan sistem pembayaran non-tunai sehingga berdampak pada peningkatan kinerja para peserta (Febrinda & Ningsih, 2022).

V. KESIMPULAN

Perkembangan teknologi telah mendorong individu untuk meningkatkan produktivitasnya. Perkembangan teknologi di bidang keuangan khususnya sistem pembayaran non-tunai telah mendorong pelaku UMKM khususnya perempuan untuk dapat meningkatkan efisiensi baik efisiensi biaya dan waktu yang digunakan. Sistem pembayaran non-tunai telah juga memudahkan individu untuk melakukan transaksi jual-beli. Hal ini dapat terlihat dari grafik 5 diatas yang menunjukkan bahwa alasan menggunakan sistem tersebut yaitu mudah, cepat, dan praktis. Disisi lain, para peserta yang tidak menggunakan sistem pembayaran non tunai karena tidak mengetahui sistem tersebut dan juga peserta yang mengetahui sistem tersebut tetapi tidak ada yang mendampingi dalam menerapkan sistem pembayaran non tunai. Pelaksanaan PKM terkait literasi keuangan sistem pembayaran non-tunai kepada para anggota IWAPI, diharapkan perempuan semakin cakap dan tanggap dalam memanfaatkan sistem pembayaran non-tunai sehingga mampu meningkatkan kinerja UMKM serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi khususnya kaum perempuan. Pelaksanaan ini berupa sosialisasi terkait jenis dan manfaat sistem pembayaran non-tunai bagi anggota IWAPI sekaligus sebagai pelaku UMKM. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran bagi peserta dalam menerapkan sistem pembayaran non-tunai dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga mendorong program pemerintah dalam menyukseskan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNTT).

Adapun saran bagi pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan digital khususnya bagi perempuan sehingga mampu meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan. Keterlibatan perempuan pada angkatan kerja juga berpengaruh pada kenaikan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah disarankan untuk melakukan pendampingan secara berkala atau rutin dalam mengontrol dan mengawasi pelaku UMKM perempuan melalui kerjasama dengan organisasi-organisasi terkait.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Dewan Pengurus Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kabupaten Sorong yang telah bekerja sama dengan segenap civitas Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sorong atas terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Pengenalan Sistem Pembayaran Non-Tunai” di distrik Salawati, Kelurahan Majener, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.

DAFTAR PUSTAKA

- Febrinda, R. ., & Ningsih, R. (2022). Kesiapan Digitalisasi Sistem Pembyaran Non Tunai Di Pasar Rakyat. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 13(1), 87–100. <https://doi.org/10.22212/jekp.v13i1.2095>
- Hidayah, N., Andjar, F. J., Iriani, L. D., Sofia, S., & Rahayu, A. (2023). Pemberdayaan Perempuan dan Ibu Rumah Tangga Untuk Mendapatkan Penghasilan Tambahan Melalui Pengelolaan Usaha Rumahan. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 2(3), 979–986.
- Hidayah, N., Ridwan, A., Prihandoko, N. D., & Nurhani, N. (2023). Factors Affecting MSMEs in Using QRIS and Electronic Data Capture (EDC) as a Cashless Payment Method: Evidence from Sorong City, Southwest Papua. *International Journal of Business Studies*, 7(3), 157–168. <https://doi.org/10.32924/ijbs.v7i3.309>
- Karim, N. K., Atikah, S., & Lenap, I. P. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penggunaan Pembayaran Elektronik Non-Bank. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(1), 39–59. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i1.147>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Upaya Peningkatan Akses Perempuan Terhadap Layanan

- Keuangan Formal. *Kementerian Keuangan RI*, 1–36.
- Kurniawati, E. T., Zuhroh, I., & Malik, N. (2021). Literasi dan Edukasi Pembayaran Non Tunai Melalui Aplikasi QR Code Indonesian Standard (QRIS) Pada Kelompok Milenial. *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 05(01), 23–30.
- Lestari, R. I., Santoso, D., & Indarto, I. (2021). Meningkatkan literasi keuangan digital pada pelaku UMKM melalui sosialisasi gerakan nasional non-tunai. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 4(3), 378. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v4i3.10947>
- Muhammad, M., Ekonomi, F., & Brawijaya, U. (2021). *Analisis Transaksi Pembayaran Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*.
- Muliati, M., Busari, A., & Noor, A. (2021). Dampak pembayaran non tunai terhadap perekonomian indonesia. *Inovasi*, 17(January 2010), 466–475. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/9857%0Ahttps://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/download/9857/1378>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Hasil snlik per kategori 62,42%. *Otoritas Jasa Keuangan*, 2013.
- Rahmi, S. Z. (2020). Analisis Pengaruh Penggunaan Instrumen Pembayaran Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2009 - 2019. *Jurnal Ilmiah M Ahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 9(2), 1–21.
- Syarifuddin, F., Hidayat, A., & Tarsidin, T. (2009). Dampak Peningkatan Pembayaran Non-Tunai Terhadap Perekonomian Dan Implikasinya Terhadap Pengendalian Moneter Di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 11(4), 369–402. <https://doi.org/10.21098/bemp.v11i4.346>
- Triagita, A., Apriani, N., Yudanto, D. W., & Lutfiah, Z. N. (2024). Analisis Dampak Penggunaan Transaksi Non Tunai (Cashless) Terhadap Pertumbuhan UMKM. *Prosiding SEMANIS : Seminar Nasional Manajemen Bisnis*, 2(1), 876–885.
- <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/elektronifikasi/default.aspx>
- <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE3MCM/persentase-tenaga-kerja-formal-menurut-jenis-kelamin.html>
- <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE1NSMy/proporsi-lapangan-kerja-informal-menurut-jenis-kelamin.html>